

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Suriname telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1951, dimana saat itu Suriname masih dibawah Pemerintahan kolonial Belanda. Hubungan diplomatik tersebut ditandai dengan didirikannya kantor perwakilan tingkat Komisariat Indonesia di Paramaribo untuk mengurus kepentingan kalangan imigran Jawa di Suriname. Namun, sempat ditutup pada tahun 1958 dan dibuka kembali pada tahun 1962 pada tingkat Konsulat Jenderal. Dan setelah kemerdekaan Suriname tahun 1975 Perwakilan Indonesia ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar (Departemen Pertanian, 2001).

Dengan didirikannya kedutaan Besar Indonesia di Suriname hubungan diplomatik kedua negara berlanjut hingga forum internasional. Dimana Indonesia dan Suriname saling memberikan dukungan dalam program pencalonan wakil-wakil negara dalam berbagai organisasi internasional. Dan sejak Suriname memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1975, Suriname selalu memberikan dukungannya kepada kedaulatan wilayah Republik Indonesia dalam permasalahan Timor-Timur dipertemuan ME-ACP (African, Caribbean, Pacific) Countries di Jenewa pada bulan Februari 1991 (Departemen Pertanian, 2001).

Pada bulan Desember 2019, Menlu Retno LP Marsudi melakukan kunjungan kerja penuh pertama ke Suriname dalam 26 tahun terakhir. Disamping melaksanakan pertemuan bilateral dengan

Menlu Suriname Yldiz Deborah Pollack-Beighle, Menlu Retno juga berkesempatan malakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Suriname, Desire Delano Bouterse. Dalam kunjungan ini Indonesia dan Suriname sepakat dalam memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi. Beberapa aspek kerjasama ekonomi yang didorong untuk diperkuat adalah pembangunan infrastruktur, pertambangan, energi, pengembangan perbankan Syariah, dan peternakan (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Kerjasama ekonomi Indonesia dan Suriname semakin ditingkatkan pada tahun 2021, yang disepakati pada Sidang Komisi Bersama (SKB) pertemuan ke-6 yang diselenggarakan secara daring. Dalam kerjasama ekonomi ini Indonesia akan meningkatkan produk ekspor yang potensial, serta pihak swasta Indonesia akan melanjutkan kerjasamanya pada sektor pembangunan infrastruktur Suriname, seperti pencarian sumber minyak lepas pantai dan pembangunan pelabuhan. Suriname menjadi mitra dagang Indonesia yang penting di wilayah Karibia, sebab secara geografis Suriname berpeluang besar menjadi gerbang utama untuk mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Selatan. Dan tercatat pada tahun 2020 nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 5,6 juta dan surplus bagi Indonesia sebesar USD 5,4 juta (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Selain dibidang ekonomi, Indonesia dan Suriname juga memfokuskan kerjasamanya dalam bidang pengembangan Pusat Pelatihan Diplomatik Suriname dan perjanjian bebas visa kunjungan bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan biasa. MOU kerjasama

pelatihan dan pendidikan diplomatik telah disepakati pada tahun 2018 dan pada Maret 2019, pihak Indonesia telah mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Kapusdiklat yang bertujuan untuk membagikan pengalaman Indonesia dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan diplomatik di *Suriname Diplomatic Institute (SDI)* dan pada 30 Maret 2021 dilaksanakan kegiatan *Tailor Made Course* bagi pejabat Kementerian Luar Negeri Suriname (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).

Suriname merupakan negara dengan corak suku dan budaya yang beraneka ragam layaknya Indonesia. Suku, budaya, dan bahasa Jawa merupakan salah satu suku dan budaya yang terus berkembang di Suriname sejak kedatangannya pada tahun 1890 yang dibawa oleh pemerintah Belanda. Dan saat ini tercatat jumlah masyarakat Suriname keturunan Jawa sekitar 15% dari total penduduk atau sekitar 80 ribu penduduk keturunan Jawa yang juga banyak dari mereka yang memiliki peran penting dipemerintahan, parlemen dan sektor swasta di Suriname (Rahmat, Supriatna, & Kamsori, 2018).

Secara historis, hal tersebut menjadi sebuah instrumen diplomasi kuat bagi Indonesia dan Suriname dalam memperkuat hubungan bilateral diberbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama. Sehingga dalam hal ini, negara Suriname khususnya keturunan Jawa-Suriname menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia yaitu dibuktikan dengan dihibahkannya USD 10.000 untuk pembangunan sentra UMKM yang bergerak dalam bidang kerajinan dan kuliner di Distrik Commewijne serta penyusunan buku dan dokumentasi sejarah migrasi masyarakat Jawa ke Suriname (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Pendekatan kebudayaan menjadi salah satu upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateralnya dengan Suriname dan menciptakan citra positif Indonesia bagi kalangan masyarakat Suriname khususnya keturunan Jawa Suriname (Kedutaan Besar Republik Indonesia Paramaribo, 2021). Salah satu pendekatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Suriname adalah dengan diselenggarakannya pameran *Indofair*. *Indofair* merupakan program tahunan diinisiasikan oleh KBRI Paramaribo melalui kerjasama dengan Komunitas Masyarakat Jawa Suriname sejak tahun 1996 dan menjadi ajang promosi kebudayaan yang efektif sebagai wahana *showcase* Indonesia. Pameran *Indofair* menjadi ajang favorit yang selalu ditunggu-tunggu oleh kalangan masyarakat Suriname setiap tahunnya, khususnya keturunan Jawa-Suriname menjadi momen untuk saling bertemu dan menikmati budaya Indonesia. Karena dalam pameran *Indofair* disediakan berbagai jenis kuliner cita rasa Nusantara dan diselenggarakan pagelaran seni dan budaya Nusantara (TIS, Ragam Tari Yogyakarta dan Batik Warnai *Indofair* 2017 di Suriname, 2017).

Pendekatan *soft power* melalui kebudayaan yang dilakukan oleh Indonesia juga difungsikan sebagai upaya untuk terus melestarikan budaya Jawa di Suriname yang dinilai semakin menurun. Tingginya aktifitas urbanisasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat Jawa dalam pendidikan di Suriname sejak tahun 1950 dan kuatnya pengaruh budaya Belanda di Suriname, mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap kualitas budaya Jawa di Suriname khususnya di kalangan generasi muda keturunan Jawa-Suriname. Dalam kesehariannya sebagian besar keluarga Jawa-

Suriname mulai melepaskan bahasa Jawanya dan memilih menggunakan bahasa Belanda, karena penggunaan bahasa Belanda dianggap lebih moderen dan menggambarkan kemajuan serta menganugrahkan status (Hoefte & Mingoen, 2022).

Bahkan, pemain musik Gamelan yang merupakan alat musik tradisional Jawa sangat sulit dijumpai di Suriname. dan tercatat bahwa saat ini hanya terdapat 5 ahli pemain Gamelan di Suriname. Sehingga mendorong KBRI secara konsisten aktif memberikan kesempatan untuk belajar memainkan gamelan Jawa yang paling umum di Indonesia. Selain itu, KBRI juga menawarkan kelas tari tradisional. Hal ini telah dilakukan sejak pembukaan Konsulat Jenderal Indonesia (kedutaan besar setelah kemerdekaan tahun 1975) di Paramaribo pada tahun 1964. Selain kelas bahasa, tari, dan gamelan di Paramaribo, beasiswa juga diberikan bagi generasi muda Jawa untuk mendaftar di institusi seni dan budaya di Indonesia. Hal ini membawa harapan bahwa sekembalinya mereka, mereka akan secara aktif mentransfer atau menggunakan ilmu yang diperoleh di tanah (Hoefte & Mingoen, 2022).

Eksistensi budaya Jawa di Suriname menciptakan sebuah kesamaan historis dan budaya anatar Indonesia dan Suriname yang menjadi fondasi bagi hubungan bilateral kedua negara. Disamping itu juga tingginya populasi keturunan Jawa di Suriname berpeluang menjadi jembatan yang dapat membangun kerjasama bilateral Indonesia dan Suriname dalam berbagai bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sebagaimana peran diaspora suatu negara dapat menjadi alat diplomasi dan pembangun jembatan kerjasama bilateral dengan negara yang mereka tempati (Ho &

McConnell, 2017). Semenatara itu, populasi keturunan Jawa yang merupakan etnis terbesar ketiga di Suriname dengan total 15% dari jumlah populasi penduduk Suriname, berpeluang besar menjadi tujuan ekspor Indonesia (World Population Review, 2023). Sehingga dalam hal ini, pendekatan Pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan dibutuhkan untuk terus membangun hubungan baik dengan komunitas keturunan Jawa di suriname, khususnya melalui pendekatan dengan dimensi kebudayaan atau disebut dengan diplomasi kebudayaan.

Secara konvensional, diplomasi merupakan sebuah strategi negosiasi suatu negara terhadap negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam perkembangannya aktor dalam kegiatan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan kelompok masyarakat ataupun individu dapat merepresentasikan kepentingan nasional negaranya, baik melalui persetujuan dari pemerintah atau menjalankannya secara mandiri (Zaelani, 2021).

Dalam mencapai sebuah kepentingan nasional, suatu negara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi, melainkan juga dengan pendekatan kebudayaan. Pasca Perang Dingin, sumber kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada militer namun juga pada sumber lainnya seperti budaya atau disebut dengan *soft power*. Dan perkembangannya kegiatan diplomasi melalui media budaya kemudian dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pertukaran pelajar, pameran budaya, sosialisasi berbagai produk budaya suatu negara melalui berbagai media seperti televisi dan internet, dan lain-lain (Zaelani, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan didiskusikan pada tesis ini adalah, apa urgensi diplomasi kebudayaan Indonesia terhadap keturunan Jawa di Suriname dan bagaimana implementasi diplomasi kebudayaan Indonesia terhadap keturunan Jawa di Suriname?

1.3 Tujuan Riset

Penulis merangkum tujuan penelitian yang ada dalam tesis ini berupa:

- a. Mengetahui dinamika peran dan perkembangan keturunan Jawa di Suriname.
- b. Mengetahui implementasi diplomasi kebudayaan pemerintah Indonesia terhadap keturunan Jawa di Suriname.
- c. Mengetahui tujuan Pemerintah Indonesia mengimplementasikan diplomasi kebudayaan terhadap keturunan Jawa di Suriname.

1.4 Kontribusi Riset

Penulis menerapkan kontribusi riset yang ada dalam tesis yaitu:

- a. Dalam ranah akademis, riset yang penulis telah perdalam nantinya akan memperkaya horizon pengetahuan akademisi baik untuk mahasiswa yang mendalami pakem

bidang ilmu lainnya dan terkhusus mahasiswa Hubungan Internasional.

- b. Dalam ranah praktis, riset yang telah penulis perdalam diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para kalangan pembuat regulasi terkait dengan diplomasi kebudayaan pemerintah Indonesia terhadap keturunan Jawa di Suriname.

1.5 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengklasifikasi beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema implementasi diplomasi kebudayaan Indonesia terhadap keturunan Jawa di Suriname:

- a. Dalam sebuah artikel jurnal yang dituliskan oleh Annisa Dwida Sunggowo Putri, Anggara Raharyo, dan Muhammad AS Hikam dengan judul *“The Practices of Indonesia’s Culture Diplomacy in Saudi Arabia through the Tourism Promotions Programs (2015-2018)”* menjelaskan bahwa, strategi diplomasi kebudayaan Indonesia dalam menarik wisatawan mancanegara khususnya Arab Saudi untuk berkunjung ke Indonesia, yaitu dengan diterapkan berbagai bentuk program promosi pariwisata di Arab Saudi dari tahun 2015 hingga 2018 yang bernuansa Islami dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak berwujud di Dunia. Dalam program promosi wisata tersebut, Annisa Dwida Sunggowo Putri menyebutkan bahwa, Indonesia menampilkan beberapa tarian budaya dan alat musik

tradisional yang diambil dari wilayah-wilayah di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, yaitu: tari Glipang, tari Piring, tari Zapin, tari Warok, tari Saman, Angklung, dan Rampak Gendhang (Putri, Raharyo, & Hikam, 2021).

- b. Dalam sebuah buku ***“Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia”*** yang dituliskan oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, dalam sub bab buku tersebut yang bertemakan diplomasi kebudayaan masa orde baru menjelaskan bahwa fenomena reseksi ekonomi global, politik proteksi perdagangan terhadap ekspor Indonesia dan moneter internasional, serta kondisi perekonomian dalam negeri pada tahun 1980-an mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan diplomasi kebudayaan. Dalam kebijakan ini Indonesia mengirimkan misi-misi kesenian, pertukaran kebudayaan dan kegiatan dalam negeri yaitu pariwisata. Salah satu upaya diplomasi kebudayaan Indonesia pada masa orde baru yaitu dengan menyelenggarakan pameran kebudayaan di Amerika Serikat (KIAS) yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, mengembangkan apresiasi seni budaya Indonesia di luar ataupun dalam negeri, serta untuk mengatasi jurang ilmu pengetahuan budaya Amerika dan Indonesia. Disamping itu juga pameran KIAS tidak lepas dari agenda politik, ekonomi, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia (Warsito & Kartikasari, 2007).